NAGRI PUSTAKA, Vol. 1 (2), DESEMBER 2023
Online-ISSN: 3032-0151
https://journal.yazri.com/index.php/nagripustaka

DI BALIK NEGOSIASI IDENTITAS JAWA TRANSMIGRAN DAN EKSKLUSI EKONOMI TIONGHOA DI RASAU: PERSPEKTIF KOMUNIKASI ANTARBUDAYA KRITIS

Julia Magdalena Wuysang
Nama Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: julia.magdalena@fisip.untan.ac.id

Abstract. *This study investigates the relationship between ethnic identity negotiation, trading restrictions, communication practices, and power relations involving Javanese transmigrant communities and Chinese communities in Rasau, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. A qualitative approach based on Constructivist Grounded Theory was employed. Data were gathered through interviews, observations, reflective notes, and document analysis involving 30 informants from both communities, community leaders, and local government representatives. The analytical process included initial coding, focused coding, constant comparison, and analytical memo writing. The analysis generated four principal categories: negotiation of ethnic identity and local belonging, production of economic exclusion, communication as a space for constructing and contesting exclusion, and negotiation of interethnic power relations. Their integration produced the concept of Negotiating Unequal Economic Belonging through Interethnic Communication. This study advances Critical Intercultural Communication by demonstrating how unequal economic access is connected to identity construction, communicative practices, and power distribution within a multiethnic society.*

Keyword: *critical intercultural communication, ethnic identity, economic exclusion, power relations*

Abstrak. *Penelitian ini mengkaji hubungan antara negosiasi identitas etnis, pembatasan perdagangan, praktik komunikasi, dan relasi kuasa antara masyarakat Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa di Rasau, Kabupaten Kubu Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Constructivist Grounded Theory. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan reflektif, dan dokumentasi yang melibatkan 30 informan dari kedua komunitas, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan lokal. Analisis data dilakukan melalui pengodean awal, pengodean terfokus, perbandingan konstan, dan memo analitis. Hasil analisis menghasilkan empat kategori utama, yakni negosiasi identitas dan keanggotaan lokal, pembentukan eksklusi ekonomi, komunikasi sebagai ruang konstruksi dan kontestasi eksklusi, serta negosiasi relasi kuasa antaretnis. Integrasi kategori tersebut menghasilkan konsep Negotiating Unequal Economic Belonging through Interethnic Communication. Penelitian ini memperkaya perspektif Komunikasi Antarbudaya Kritis dengan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses ekonomi berkaitan dengan konstruksi identitas, praktik komunikasi, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat multietnis.*

Kata Kunci: komunikasi antarbudaya kritis, identitas etnis, eksklusi ekonomi, relasi kuasa

Copyright © 2023 The Author(s)
This is an open-access article under the CC BY-SA license.
Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

PENDAHULUAN

Keberagaman etnis dalam suatu masyarakat tidak selalu berjalan beriringan dengan kesetaraan hubungan sosial dan ekonomi. Perbedaan asal-usul, sejarah migrasi, identitas budaya, dan posisi sosial dapat membentuk pola hubungan antarkelompok yang melibatkan penerimaan, persaingan, kerja sama, bahkan pembatasan terhadap pihak tertentu. Dalam masyarakat multietnis, persoalan yang muncul bukan hanya bagaimana kelompok-kelompok berbeda mempertahankan identitas budayanya, melainkan juga bagaimana mereka memperoleh pengakuan dan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam kehidupan bersama. Auwalin (2020) menjelaskan bahwa identitas etnis dan norma sosial memiliki keterkaitan dengan pola

migrasi internal serta pembentukan rasa memiliki terhadap kelompok. Sementara itu, Sienkiewicz (2022), melalui kajian mengenai hubungan masyarakat adat dan migran internal di Seram Barat, menunjukkan bahwa perbedaan posisi antara penduduk lokal dan kelompok migran dapat berkaitan dengan ketimpangan dalam kepemimpinan dan penguasaan sumber daya. Persoalan tersebut memiliki relevansi dalam konteks masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Rasau, Kabupaten Kubu Raya, yang memiliki sejarah perkembangan permukiman transmigrasi dan interaksi antarkelompok etnis. Kehadiran masyarakat Jawa yang memiliki keterkaitan historis dengan program transmigrasi serta komunitas Tionghoa yang terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi setempat membentuk suatu ruang interaksi dengan pengalaman dan kepentingan yang tidak selalu sama. Dalam konteks ini, informasi awal mengenai pembatasan aktivitas perdagangan terhadap sebagian anggota komunitas Tionghoa menghadirkan persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian akademis. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana batas-batas keanggotaan masyarakat dibentuk, siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan legitimasi aktivitas ekonomi, dan sejauh mana identitas etnis berhubungan dengan penerimaan atau pembatasan akses perdagangan. Oleh karena itu, dinamika masyarakat Jawa dan Tionghoa di Rasau tidak cukup dipahami sebagai pertemuan dua kelompok dengan latar belakang budaya berbeda, tetapi perlu dianalisis sebagai hubungan sosial yang di dalamnya terdapat proses negosiasi identitas, pengakuan, kepentingan ekonomi, dan distribusi kekuasaan.

Persoalan pembatasan aktivitas perdagangan menjadi penting karena akses terhadap kegiatan ekonomi merupakan salah satu unsur mendasar dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan individu maupun kelompok. Kesempatan untuk menjalankan usaha tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan modal, keterampilan, dan persaingan pasar, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat ditentukan oleh penerimaan sosial, jaringan komunitas, norma lokal, serta hubungan seseorang dengan kelompok yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Sen (2000) menjelaskan bahwa eksklusi sosial tidak sekadar berkaitan dengan kekurangan sumber daya, tetapi juga dengan kondisi ketika individu atau kelompok mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Pemikiran tersebut diperluas oleh Bracic (2022), yang menunjukkan bahwa eksklusi berbasis etnis dapat muncul dalam berbagai ranah kehidupan dan membatasi kemampuan kelompok tertentu untuk memperoleh kesempatan yang setara. Dalam konteks Indonesia, penelitian Sienkiewicz (2022) memperlihatkan bahwa kelompok migran internal dapat menghadapi ketidaksetaraan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan posisi sosial ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki klaim historis terhadap wilayah tertentu. Sementara itu, Fachrurrazi (2019) mengungkapkan bahwa hubungan ekonomi Melayu–Tionghoa di kawasan pesisir utara Kalimantan Barat tidak dapat dilepaskan dari dinamika dominasi dan pemeliharaan status quo dalam hubungan antaretnis. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan ekonomi di masyarakat multietnis dapat dipengaruhi oleh struktur sosial yang melampaui mekanisme persaingan pasar. Meskipun demikian, pembatasan perdagangan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai diskriminasi etnis tanpa memperhatikan bentuk tindakan, dasar kebijakan, aktor yang terlibat, dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam kasus Rasau, persoalan tersebut perlu dilihat melalui perbedaan antara pembatasan yang bersumber dari ketentuan formal dan praktik informal yang berkembang dalam hubungan sosial masyarakat. Pembedaan ini penting untuk mengetahui apakah hambatan perdagangan berkaitan dengan kepentingan pengelolaan ekonomi, persaingan antarpelaku usaha, atau konstruksi batas sosial yang menjadikan identitas etnis sebagai dasar penerimaan dan penolakan. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan bagaimana kesempatan ekonomi dapat dipengaruhi oleh hubungan antaretnis serta bagaimana praktik pembatasan memperoleh legitimasi dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan antara identitas etnis dan penerimaan sosial menjadi dimensi penting untuk memahami dinamika tersebut. Identitas tidak hanya menunjukkan asal-usul seseorang, tetapi juga terbentuk melalui interaksi sosial, proses pengategorian, pengakuan, dan cara individu menempatkan dirinya dalam hubungan dengan orang lain. Bucholtz dan Hall (2005) menjelaskan bahwa identitas merupakan hasil konstruksi sosial yang berlangsung melalui praktik

interaksional, sehingga maknanya dapat berubah sesuai dengan konteks dan hubungan antarpelaku. Dalam masyarakat yang terbentuk melalui migrasi, proses pembentukan identitas menjadi lebih kompleks karena sejarah kedatangan, pengalaman bermukim, keterlibatan dalam kehidupan komunitas, dan penerimaan masyarakat dapat memengaruhi rasa memiliki terhadap suatu wilayah. Hidayat dan Farid (2021), melalui penelitian mengenai negosiasi identitas masyarakat Tionghoa di Madura, menunjukkan bahwa penerimaan sosial dapat berkaitan dengan penggunaan bahasa lokal, praktik kebudayaan setempat, dan berbagai bentuk penyesuaian identitas dalam hubungan dengan kelompok mayoritas. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa identitas kelompok minoritas tidak selalu ditampilkan secara tetap, melainkan dapat dinegosiasikan melalui strategi interaksi dan penyesuaian sosial. Temuan yang relevan juga dikemukakan Birnie-Smith (2022) melalui penelitiannya mengenai masyarakat Tionghoa Indonesia di Pontianak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik identitas berkaitan dengan hubungan antara struktur sosial, ideologi, pengalaman sosialisasi, dan agensi individu, termasuk bagaimana penggunaan bahasa menjadi bagian dari pembentukan posisi identitas dalam interaksi sehari-hari. Kedua penelitian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami bahwa identitas Tionghoa di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat identitas tersebut dibentuk dan dinegosiasikan. Namun, perhatian terhadap strategi identitas dan praktik interaksi belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana pengakuan sosial berkaitan dengan legitimasi untuk mengakses ruang ekonomi. Dalam konteks Rasau, persoalan identitas menjadi lebih kompleks ketika sejarah transmigrasi masyarakat Jawa berinteraksi dengan keberadaan komunitas Tionghoa dalam lingkungan ekonomi yang sama. Lamanya seseorang bermukim, keterlibatan dalam kehidupan masyarakat, maupun asal-usul etnis dapat menjadi unsur yang digunakan untuk membangun klaim keanggotaan lokal. Oleh sebab itu, penelitian ini memandang penting untuk memahami bagaimana masyarakat Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa membentuk serta menegosiasikan identitas dan rasa memiliki, sekaligus bagaimana pengakuan tersebut berhubungan dengan penerimaan sosial dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas perdagangan.

Di samping identitas dan keanggotaan lokal, praktik komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk cara masyarakat memahami perbedaan serta menentukan batas hubungan antarkelompok. Komunikasi antaretnis tidak selalu berlangsung sebagai pertukaran pesan yang netral karena penggunaan bahasa, pemberian label, penyebaran stereotip, dan pembentukan narasi sosial dapat mencerminkan perbedaan posisi serta kepentingan para pelakunya. Halualani dan Nakayama (2010) menjelaskan bahwa Komunikasi Antarbudaya Kritis (*Critical Intercultural Communication/CIC*) mengarahkan perhatian pada keterkaitan antara kebudayaan, sejarah, ideologi, dan kekuasaan dalam hubungan antarbudaya. Perspektif ini memberikan ruang untuk mempertanyakan bagaimana kategori budaya dibentuk, siapa yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikannya, dan bagaimana perbedaan tersebut berhubungan dengan ketidaksetaraan sosial. Piller (2011) juga menegaskan bahwa identitas dan perbedaan budaya perlu dipahami melalui praktik wacana yang membentuk makna serta posisi sosial suatu kelompok. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Hua et al. (2022) memberikan perhatian terhadap bagaimana pembedaan sosial dan posisi kekuasaan dapat direproduksi melalui tindakan serta interaksi komunikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Rasau, perspektif tersebut memungkinkan aktivitas perdagangan dipahami sebagai ruang sosial tempat berbagai narasi mengenai pendatang, warga lokal, kepantasan, dan legitimasi ekonomi dapat berkembang. Pernyataan yang mengaitkan identitas etnis dengan hak untuk menggunakan ruang perdagangan, misalnya, perlu dipahami berdasarkan siapa yang menyampaikannya, dalam situasi apa pernyataan tersebut muncul, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan kelompok lain. Narasi semacam itu dapat memperkuat batas sosial apabila digunakan untuk membenarkan pembatasan kesempatan ekonomi. Sebaliknya, penolakan terhadap pelabelan etnis dan tuntutan agar aktivitas perdagangan dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat menjadi bentuk perlawanan komunikatif terhadap praktik eksklusi. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat atau menyelesaikan perbedaan, tetapi

juga menjadi arena pembentukan, pemeliharaan, dan penentangan terhadap batas antarkelompok. Analisis terhadap praktik komunikasi tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana stereotip dan narasi sosial memperoleh pengaruh dalam kehidupan ekonomi serta bagaimana individu atau kelompok berupaya mempertahankan posisi dan kepentingannya di tengah hubungan antaretnis yang tidak selalu setara.

Persoalan komunikasi dan identitas tersebut tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang menentukan kemampuan setiap aktor dalam memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Kekuasaan dalam masyarakat multietnis tidak selalu hadir melalui keputusan resmi pemerintah atau aturan tertulis, tetapi dapat bekerja melalui pengaruh tokoh masyarakat, jaringan sosial, penguasaan sumber daya, kesepakatan komunitas, dan kemampuan suatu kelompok membentuk norma yang diterima sebagai sesuatu yang wajar. Lamont dan Molnár (2002) menjelaskan bahwa batas simbolik yang digunakan untuk membedakan kelompok dapat berkembang menjadi batas sosial ketika pembedaan tersebut menghasilkan konsekuensi nyata terhadap akses dan kesempatan. Sanders (2002) juga menunjukkan bahwa jaringan sosial dan penutupan batas kelompok etnis dapat memengaruhi pola hubungan serta pemeliharaan identitas dalam masyarakat plural. Perspektif tersebut membantu menjelaskan bahwa ketimpangan tidak selalu muncul melalui tindakan diskriminatif yang dinyatakan secara terbuka, tetapi dapat berkembang melalui hubungan sosial yang memberikan kewenangan lebih besar kepada aktor tertentu dalam menentukan penerimaan dan akses kelompok lain. Dalam konteks Kalimantan Barat, Fachrurrazi (2019) memperlihatkan bahwa hubungan ekonomi Melayu–Tionghoa dapat berkaitan dengan dominasi dan pemeliharaan kepentingan kelompok yang memiliki posisi lebih kuat. Meskipun penelitian tersebut memiliki konteks kelompok etnis dan wilayah yang berbeda, temuannya memberikan pembanding untuk memahami bagaimana relasi ekonomi dapat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan batas sosial. Dalam kehidupan masyarakat Rasau, persoalan tersebut perlu diperhatikan melalui hubungan antara pengaruh komunitas, kewenangan kelembagaan, dan kepentingan pelaku ekonomi dalam mengatur aktivitas perdagangan. Penting pula untuk membedakan kewenangan formal pemerintah dari pengaruh informal tokoh masyarakat maupun tindakan individual, sehingga suatu pembatasan tidak serta-merta dianggap sebagai keputusan kolektif kelompok etnis tertentu. Analisis relasi kuasa juga perlu mempertimbangkan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan di dalam masing-masing komunitas. Dengan cara pandang tersebut, hubungan masyarakat Jawa dan Tionghoa tidak diposisikan sebagai pertentangan dua kelompok yang homogen, melainkan sebagai hubungan dinamis yang melibatkan berbagai aktor dengan sumber daya, kewenangan, dan kemampuan negosiasi yang berbeda. Pemahaman ini diperlukan untuk mengungkap bagaimana kekuasaan memengaruhi legitimasi aktivitas perdagangan, bagaimana batas ekonomi dipertahankan, dan bagaimana pihak-pihak yang mengalami pembatasan berupaya memperjuangkan kesempatan yang lebih setara.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan pemahaman mengenai identitas etnis, migrasi internal, eksklusi sosial, dan hubungan ekonomi antaretnis, keterkaitan antara seluruh dimensi tersebut dalam pembentukan pembatasan aktivitas perdagangan masih memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Auwalin (2020) membahas hubungan identitas etnis dengan keputusan migrasi internal di Indonesia, Hidayat dan Farid (2021) mengkaji strategi negosiasi identitas masyarakat Tionghoa di Madura, Birnie-Smith (2022) menelaah hubungan struktur sosial dan agensi dalam praktik identitas masyarakat Tionghoa di Pontianak, sedangkan Sienkiewicz (2022) memperlihatkan ketimpangan posisi sosial yang dapat dialami kelompok migran internal. Bracic (2022) memberikan tinjauan mengenai eksklusi sosial berbasis etnis, sementara Fachrurrazi (2019) mengkaji dominasi dalam hubungan ekonomi Melayu–Tionghoa di Kalimantan Barat. Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa identitas, migrasi, struktur sosial, dan hubungan ekonomi memiliki keterkaitan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat multietnis. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mempertemukan negosiasi identitas Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa dengan mekanisme pembatasan perdagangan serta praktik komunikasi yang berperan dalam mempertahankan atau menentang pembatasan tersebut di Rasau. Kesenjangan ini menunjukkan

perlunya kajian yang tidak hanya membicarakan hubungan ekonomi antaretnis atau konstruksi identitas secara terpisah, tetapi juga menjelaskan bagaimana keduanya berhubungan dengan legitimasi sosial dan distribusi kekuasaan. Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan eksklusi ekonomi sebagai persoalan komunikatif dan relasional yang berkaitan dengan pembentukan identitas, pengakuan keanggotaan lokal, praktik komunikasi, serta ketimpangan relasi kuasa. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana identitas masyarakat Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa dikonstruksi serta dinegosiasikan dalam kehidupan sosial-ekonomi Rasau, bagaimana bentuk dan mekanisme pembatasan aktivitas perdagangan berlangsung, serta bagaimana aktor dan kepentingan tertentu memperoleh legitimasi dalam proses tersebut. Perhatian juga diarahkan pada peran narasi, stereotip, dan strategi komunikasi dalam membenarkan, mempertahankan, menantang, atau menegosiasikan pembatasan, termasuk bagaimana perbedaan posisi kekuasaan memengaruhi akses ekonomi dan kesempatan kedua kelompok untuk menyampaikan kepentingannya. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini diharapkan terletak pada perluasan perspektif Komunikasi Antarbudaya Kritis melalui penjelasan mengenai hubungan antara praktik komunikasi dan ketidaksetaraan keanggotaan ekonomi dalam masyarakat multietnis. Secara empiris, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kontekstual mengenai dinamika Jawa–Tionghoa di Rasau, sedangkan secara konseptual penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai bagaimana identitas, legitimasi, komunikasi, dan kekuasaan saling berhubungan dalam membentuk akses terhadap kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran bagi pengembangan hubungan antaretnis yang lebih setara serta tata kehidupan ekonomi masyarakat yang terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Constructivist Grounded Theory* (CGT) sebagaimana dikembangkan oleh Charmaz (2014). Desain ini dipilih untuk membangun pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antara negosiasi identitas etnis, praktik komunikasi, dan relasi kekuasaan dalam dinamika eksklusi ekonomi di Rasau, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. CGT memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi interpretatif yang terbentuk melalui interaksi antara peneliti, partisipan, dan konteks sosial. Penelitian melibatkan 30 informan yang terdiri atas 10 orang masyarakat Jawa, 10 orang komunitas Tionghoa, lima tokoh masyarakat, serta lima unsur pemerintahan lokal, yaitu satu camat, satu kepala bidang kesejahteraan rakyat, dan tiga kepala desa di sekitar kawasan pasar Rasau. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengalaman, keterlibatan, dan pengetahuan mereka mengenai hubungan sosial-ekonomi serta dinamika antaretnis. Keragaman informan dimaksudkan untuk memperoleh perspektif dari berbagai posisi sosial dan kelembagaan, sehingga fenomena penelitian tidak hanya dijelaskan berdasarkan pengalaman satu kelompok.

Data penelitian dibangkitkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi lapangan, catatan reflektif, dan analisis dokumen. Wawancara diarahkan pada pengalaman perdagangan, negosiasi identitas, hubungan antaretnis, praktik komunikasi, serta persepsi mengenai kewenangan dan akses ekonomi. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi sosial dan aktivitas ekonomi dalam konteks keseharian masyarakat, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk menelaah peraturan, kesepakatan, dan catatan kelembagaan yang relevan. Analisis data berlangsung secara simultan dengan proses pembangkitan data melalui tahapan *initial coding*, *focused coding*, dan pengembangan hubungan teoretis antarkategori. Proses tersebut didukung oleh *constant comparative analysis* untuk membandingkan pengalaman, peristiwa, kode, dan kategori, serta penulisan *analytic memos* untuk mendokumentasikan perkembangan interpretasi dan hubungan konseptual. Tahapan tersebut mengikuti prinsip analisis CGT yang menekankan pengembangan kode dan kategori secara bertahap berdasarkan data empiris (Charmaz, 2014; Thornberg & Charmaz, 2014). Perspektif Komunikasi Antarbudaya Kritis (*Critical Intercultural Communication*/CIC) digunakan sebagai konsep pemeka (*sensitizing*

concepts) dalam menginterpretasikan hubungan antara komunikasi, identitas, dan kekuasaan, bukan sebagai kategori analisis yang ditetapkan secara kaku sejak awal.

Kredibilitas dan kualitas penelitian diperkuat melalui perbandingan informasi dari berbagai kelompok informan dan sumber data, pemeriksaan terhadap pengalaman yang berbeda atau bertentangan, serta dokumentasi proses analisis. Refleksivitas dilakukan dengan mencatat asumsi, posisi, dan kemungkinan keberpihakan peneliti selama interaksi lapangan dan interpretasi data. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi proses penelitian dan memastikan bahwa interpretasi mempertimbangkan keragaman pengalaman partisipan. Upaya tersebut sejalan dengan kriteria kualitas penelitian kualitatif yang mencakup ketelitian, ketulusan reflektif, kredibilitas, resonansi, etika, dan koherensi metodologis (Tracy, 2010). Dari aspek etika, penelitian memperhatikan persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*), kesukarelaan partisipasi, anonimitas, kerahasiaan informasi, serta perlindungan data. Mengingat sensitivitas isu hubungan antaretnis dan kemungkinan pembatasan aktivitas ekonomi, penyajian temuan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari generalisasi, penguatan stereotip, maupun risiko sosial dan ekonomi bagi informan.

HASIL DAN DISKUSI

Negosiasi Identitas Etnis dan Keanggotaan Lokal

Identitas etnis dalam kehidupan masyarakat Rasau tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan hubungan sosial yang berlangsung dalam ruang permukiman dan aktivitas ekonomi. Keberadaan masyarakat Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa memperlihatkan bahwa identitas tidak hanya berkaitan dengan asal-usul keturunan, bahasa, ataupun latar belakang kebudayaan, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana individu menempatkan dirinya dan memperoleh pengakuan dari lingkungan sosial. Dalam masyarakat yang memiliki sejarah migrasi dan perjumpaan antarkelompok, identitas menjadi bagian dari proses negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus. Pengalaman bermukim, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, hubungan antarkeluarga, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat dapat membentuk pemahaman seseorang mengenai keberadaannya di suatu wilayah. Oleh karena itu, identitas Jawa transmigran dan Tionghoa di Rasau perlu dipahami sebagai konstruksi sosial yang berhubungan dengan pengalaman historis sekaligus interaksi kontemporer. Perspektif ini menghindarkan analisis dari anggapan bahwa identitas etnis merupakan kategori yang bersifat tetap dan secara otomatis menentukan posisi seseorang dalam masyarakat.

Sejarah penempatan masyarakat transmigran Jawa di kawasan Rasau Jaya memberikan konteks penting dalam memahami terbentuknya keterikatan terhadap wilayah. Proses menetap, membangun kehidupan keluarga, mengembangkan mata pencaharian, dan membentuk jaringan sosial merupakan pengalaman yang dapat memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Dalam perjalanan waktu, pengalaman tersebut dapat menjadi bagian dari memori kolektif yang membentuk identitas komunitas. Namun, keterikatan historis tidak dengan sendirinya menjadikan suatu kelompok memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan keanggotaan sosial kelompok lain. Keberadaan komunitas Tionghoa juga perlu ditempatkan dalam dinamika kehidupan masyarakat setempat, terutama melalui hubungan sosial dan aktivitas ekonomi yang dijalankan. Dengan demikian, persoalan keanggotaan lokal bukan semata-mata mengenai siapa yang lebih dahulu menempati wilayah atau kelompok mana yang memiliki sejarah permukiman lebih panjang. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pengalaman bermukim, kontribusi sosial, dan hubungan keseharian memperoleh pengakuan dalam kehidupan bersama. Kajian Harjanti (2021) mengenai sejarah penempatan dan adaptasi transmigran Jawa Barat di Kecamatan Rasau Jaya memberikan landasan kontekstual untuk memahami proses tersebut, sedangkan kajian

Birnie-Smith (2022) menunjukkan bahwa identitas masyarakat Tionghoa Indonesia juga dibentuk melalui hubungan antara struktur sosial dan agensi individu.

Negosiasi identitas menjadi semakin kompleks ketika kategori etnis berhubungan dengan penilaian mengenai kepantasan, penerimaan, dan legitimasi seseorang dalam ruang sosial-ekonomi. Sebutan seperti masyarakat lokal, pendatang, orang Jawa, dan orang Tionghoa bukan sekadar penanda asal-usul, melainkan dapat memiliki makna sosial yang berbeda bergantung pada siapa yang menggunakannya, dalam situasi apa istilah tersebut disampaikan, dan kepentingan apa yang menyertainya. Dalam interaksi tertentu, identitas dapat menjadi sarana untuk membangun kedekatan dan solidaritas. Namun, dalam situasi lain, identitas juga dapat digunakan untuk membedakan kelompok yang dianggap memiliki keterikatan lebih kuat dengan wilayah dari kelompok yang diposisikan sebagai pihak luar. Proses kategorisasi tersebut perlu diperiksa secara kritis karena dapat memengaruhi bagaimana individu memperoleh pengakuan dan membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. Bucholtz dan Hall (2005) menjelaskan bahwa identitas terbentuk melalui praktik interaksional yang melibatkan proses identifikasi, pembedaan, dan pengakuan. Berdasarkan perspektif tersebut, identitas tidak cukup dianalisis melalui pengakuan seseorang terhadap asal-usul etnisnya, tetapi juga melalui cara orang lain memberikan posisi sosial kepadanya. Artinya, identitas merupakan proses relasional yang memungkinkan seseorang mengonstruksi keanggotaan sekaligus menghadapi penilaian dari lingkungan sosialnya.

Dalam perspektif Komunikasi Antarbudaya Kritis, negosiasi identitas perlu dibaca dengan memperhatikan hubungan antara representasi budaya dan distribusi kekuasaan. Persoalan identitas tidak berhenti pada bagaimana masyarakat Jawa dan Tionghoa memahami perbedaan masing-masing, tetapi juga mencakup bagaimana perbedaan tersebut memperoleh makna dalam hubungan sosial dan aktivitas ekonomi. Pengakuan terhadap keberadaan suatu kelompok dapat memengaruhi kesempatan membangun hubungan, memperoleh kepercayaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, ketika identitas digunakan untuk membatasi penerimaan sosial, perbedaan etnis berpotensi berkembang menjadi batas yang memisahkan posisi antarkelompok. Oleh karena itu, analisis terhadap identitas di Rasau perlu menghindari generalisasi bahwa seluruh anggota masyarakat Jawa memiliki pandangan yang sama atau bahwa komunitas Tionghoa mempunyai pengalaman yang seragam. Perhatian harus diarahkan pada variasi pengalaman individu, perbedaan posisi sosial, dan proses interaksi yang membentuk pengakuan. Dengan demikian, negosiasi identitas etnis dapat dipahami sebagai proses pembentukan keanggotaan lokal yang dinamis, ketika sejarah permukiman, pengalaman sosial, dan pengakuan antarkelompok saling berhubungan dalam menentukan posisi seseorang di lingkungan masyarakat.

Produksi dan Pemeliharaan Eksklusi Ekonomi

Eksklusi ekonomi merupakan persoalan yang perlu dipahami melalui proses sosial yang memengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh akses dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks hubungan masyarakat Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa di Rasau, persoalan ini berkaitan dengan bagaimana kesempatan menjalankan aktivitas perdagangan dipahami, diatur, dan dinegosiasikan oleh para aktor yang terlibat. Pembatasan aktivitas ekonomi tidak selalu muncul dalam bentuk larangan tertulis atau keputusan kelembagaan. Dalam kondisi tertentu, hambatan dapat berlangsung melalui tekanan sosial, penolakan informal, pembentukan persepsi mengenai kepantasan, atau pengaruh jaringan yang mengendalikan akses terhadap ruang perdagangan. Namun, setiap bentuk hambatan tersebut harus dibedakan berdasarkan bukti yang tersedia. Persaingan antarpedagang,

misalnya, tidak dapat secara otomatis disebut sebagai eksklusi berbasis etnis apabila tidak ditemukan hubungan antara persaingan tersebut dan pembatasan identitas kelompok. Oleh sebab itu, penelitian perlu mengidentifikasi mekanisme yang secara nyata memengaruhi kesempatan berdagang, pihak yang terlibat dalam proses pembatasan, serta konsekuensi yang dialami oleh pelaku usaha. Pembedaan tersebut penting agar konsep eksklusi ekonomi tidak digunakan secara berlebihan untuk menjelaskan seluruh bentuk ketegangan dalam aktivitas perdagangan.

Proses produksi eksklusi ekonomi dapat dianalisis melalui hubungan antara akses terhadap ruang usaha, pengakuan sosial, dan legitimasi aktivitas perdagangan. Akses terhadap ruang ekonomi tidak selalu hanya ditentukan oleh kemampuan modal atau keterampilan seseorang dalam menjalankan usaha. Dalam lingkungan sosial tertentu, penerimaan masyarakat, hubungan dengan jaringan perdagangan, serta pengakuan dari aktor yang memiliki pengaruh juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Apabila suatu kelompok menghadapi hambatan karena identitas etnisnya, persoalan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara batas sosial dan ketimpangan kesempatan. Akan tetapi, hubungan tersebut perlu dibuktikan melalui pengalaman konkret para informan, bukan hanya berdasarkan dugaan atau persepsi umum. Sen (2000) menjelaskan bahwa eksklusi sosial berkaitan dengan kondisi ketika seseorang atau kelompok mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemikiran ini memperluas pemahaman mengenai ketidaksetaraan karena perhatian tidak hanya diarahkan pada perbedaan hasil ekonomi, tetapi juga pada proses yang menyebabkan sebagian pihak memiliki kesempatan lebih terbatas dibandingkan pihak lain. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut dapat digunakan untuk menelaah apakah pengalaman pembatasan perdagangan berkaitan dengan kondisi yang menghalangi partisipasi ekonomi komunitas Tionghoa.

Pembentukan dan pemeliharaan eksklusi ekonomi juga berkaitan dengan keberadaan batas simbolik yang berkembang dalam hubungan antarkelompok. Batas simbolik terbentuk melalui klasifikasi sosial, penilaian, dan pemaknaan yang membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya. Batas tersebut menjadi lebih bermakna ketika menghasilkan konsekuensi nyata terhadap akses sumber daya, kesempatan usaha, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Lamont dan Molnár (2002) menjelaskan bahwa batas simbolik dan batas sosial memiliki keterkaitan, tetapi keduanya tidak dapat disamakan. Pembedaan dalam pemikiran atau representasi belum tentu menghasilkan ketimpangan material apabila tidak berhubungan dengan praktik sosial yang membatasi kesempatan. Sebaliknya, ketika penilaian terhadap identitas tertentu diterjemahkan menjadi penolakan, hambatan, atau pengurangan akses, batas simbolik dapat berkembang menjadi batas sosial yang memiliki dampak nyata. Dalam konteks Rasau, kerangka ini membantu mengarahkan analisis pada hubungan antara kategorisasi etnis dan praktik perdagangan. Penelitian perlu memperhatikan apakah penilaian mengenai asal-usul kelompok digunakan dalam proses pengambilan keputusan, bagaimana penilaian tersebut disampaikan, dan apakah terdapat konsekuensi terhadap keberlanjutan usaha. Dengan cara ini, eksklusi ekonomi dapat dianalisis sebagai proses yang memiliki dimensi simbolik sekaligus material.

Pemahaman terhadap eksklusi ekonomi juga menuntut perhatian pada konteks historis dan struktur hubungan sosial di Kalimantan Barat. Sejarah hubungan antaretnis dapat memberikan latar untuk memahami pembentukan jaringan, persepsi, dan pola interaksi ekonomi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung bahwa pembatasan tertentu terjadi pada masa penelitian. Fachrurrazi (2019), melalui kajian

mengenai hubungan ekonomi Melayu–Tionghoa di wilayah pesisir Kalimantan Barat, memberikan perspektif regional tentang pentingnya memahami relasi ekonomi dalam kaitannya dengan struktur sosial antarkelompok. Meskipun konteks tersebut berbeda dari hubungan Jawa–Tionghoa di Rasau, kajian itu memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dapat berlangsung dalam jaringan sosial yang memiliki sejarah dan konfigurasi kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, analisis di Rasau perlu membedakan antara konteks historis, persepsi informan, praktik pembatasan yang dapat diverifikasi, dan keputusan formal yang memiliki dasar administratif. Pemisahan tersebut akan mencegah penelitian menyederhanakan persoalan ekonomi sebagai konflik etnis semata. Pada akhirnya, eksklusi ekonomi perlu dijelaskan melalui hubungan yang dapat ditelusuri antara aktor, mekanisme pembatasan, legitimasi sosial, dan konsekuensi terhadap kesempatan perdagangan. Penjelasan semacam ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran yang lebih cermat mengenai bagaimana akses ekonomi dapat dinegosiasikan atau dibatasi dalam masyarakat multietnis.

Komunikasi Antaretnis sebagai Ruang Konstruksi dan Kontestasi Eksklusi

Komunikasi antaretnis memiliki peran penting dalam pembentukan hubungan sosial karena melalui komunikasi individu dan kelompok menyampaikan identitas, membangun pemahaman, serta menegosiasikan kepentingan masing-masing. Dalam hubungan masyarakat Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa di Rasau, komunikasi perlu dipahami bukan hanya sebagai kegiatan bertukar informasi, melainkan juga sebagai proses yang dapat memengaruhi bagaimana perbedaan etnis dimaknai dan ditempatkan dalam kehidupan bersama. Percakapan sehari-hari, penyampaian pendapat, penggunaan istilah tertentu, serta pembicaraan mengenai aktivitas perdagangan dapat membentuk persepsi terhadap kelompok lain. Melalui proses tersebut, suatu kelompok dapat digambarkan sebagai bagian dari komunitas, pihak luar, pesaing, atau kelompok yang dianggap memiliki posisi tertentu dalam kehidupan ekonomi. Makna yang terbentuk tidak selalu bersifat netral karena dapat dipengaruhi oleh pengalaman, kepentingan, dan posisi sosial penutur. Oleh karena itu, analisis komunikasi perlu memperhatikan konteks berlangsungnya interaksi, hubungan antara pihak yang berkomunikasi, serta kemungkinan dampak dari pesan yang disampaikan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian melihat komunikasi sebagai bagian dari pembentukan realitas sosial, bukan sekadar saluran yang menyampaikan ketegangan antarkelompok.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana narasi dan stereotip etnis digunakan untuk menjelaskan atau menilai aktivitas kelompok lain. Stereotip dapat menyederhanakan keragaman pengalaman individu dengan menghubungkan karakteristik tertentu kepada seluruh anggota kelompok berdasarkan identitasnya. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, penyederhanaan tersebut berpotensi memengaruhi cara masyarakat menilai kepantasan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan. Apabila suatu narasi terus diulang dan memperoleh penerimaan sosial, narasi tersebut dapat membentuk pemahaman kolektif yang memengaruhi hubungan antarkelompok. Namun, tidak setiap pernyataan mengenai perbedaan etnis dapat langsung dikategorikan sebagai praktik eksklusi. Penelitian harus mengidentifikasi apakah narasi tersebut digunakan untuk membenarkan pembatasan, apakah terdapat pengulangan dalam interaksi sosial, serta apakah pernyataan tersebut memiliki konsekuensi terhadap akses ekonomi atau pengakuan sosial. Piller (2011) menjelaskan bahwa perbedaan budaya dan identitas tidak dapat dilepaskan dari proses diskursif yang memberikan makna terhadap kategori sosial. Dengan demikian, stereotip perlu dianalisis berdasarkan fungsi sosialnya, bukan hanya berdasarkan isi pernyataan. Perhatian

terhadap fungsi tersebut membantu membedakan antara ekspresi pendapat individual, representasi kelompok, dan wacana yang berpotensi mempertahankan ketimpangan.

Pada saat yang sama, komunikasi antaretnis juga menyediakan ruang untuk mempertanyakan dan menegosiasikan kembali narasi yang membatasi hubungan sosial. Individu dapat menyampaikan keberatan terhadap pelabelan, menolak pengaitan persoalan ekonomi dengan identitas etnis, atau mengupayakan penyelesaian masalah berdasarkan kepentingan yang lebih konkret. Bentuk komunikasi semacam ini memperlihatkan bahwa anggota kelompok tidak selalu menerima secara pasif kategori dan penilaian yang dilekatkan kepada mereka. Mereka dapat menggunakan pengalaman pribadi, hubungan sosial, maupun argumentasi tertentu untuk mengubah cara keberadaan kelompoknya dipahami oleh masyarakat. Dalam proses tersebut, komunikasi menjadi ruang kontestasi karena berbagai pihak dapat menawarkan penafsiran yang berbeda mengenai identitas, kepantasan, dan legitimasi. Perspektif Komunikasi Antarbudaya Kritis yang dikembangkan dalam kajian Halualani dan Nakayama (2010) membantu menjelaskan bahwa interaksi antarbudaya selalu berkaitan dengan konteks sejarah, ideologi, dan kekuasaan. Oleh karena itu, kemampuan menyampaikan pendapat perlu dilihat bersama dengan posisi sosial pihak yang berbicara. Tidak semua pihak memiliki kesempatan, pengaruh, atau tingkat penerimaan yang sama ketika menyampaikan keberatan. Dengan demikian, komunikasi yang tampak berlangsung secara terbuka belum tentu mencerminkan kesetaraan apabila terdapat perbedaan kapasitas untuk menentukan arah pembicaraan dan memengaruhi keputusan.

Dalam konteks penelitian di Rasau, analisis komunikasi perlu menghubungkan isi pesan dengan struktur hubungan sosial yang melingkupinya. Pernyataan yang disampaikan dalam percakapan informal, forum masyarakat, hubungan perdagangan, maupun interaksi dengan aparat dapat memiliki konsekuensi yang berbeda bergantung pada posisi para pihak. Komunikasi dapat memperkuat batas antarkelompok apabila digunakan untuk mengulang stereotip dan membenarkan pembatasan. Sebaliknya, komunikasi dapat membuka ruang penyelesaian apabila memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menjelaskan pengalaman dan kepentingannya tanpa terlebih dahulu dinilai berdasarkan identitas etnis. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar apakah komunikasi berlangsung atau tidak, tetapi bagaimana proses komunikasi tersebut dibentuk, siapa yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, dan pandangan siapa yang memperoleh pengakuan. Dalam kerangka CIC, analisis semacam ini menggeser perhatian dari perbedaan budaya sebagai sumber masalah menuju hubungan antara representasi, kepentingan, dan kekuasaan. Dengan demikian, komunikasi antaretnis di Rasau dapat dipahami sebagai ruang yang memungkinkan reproduksi sekaligus penantangan eksklusi. Penjelasan tersebut perlu diperkuat dengan contoh interaksi aktual dari wawancara dan observasi agar mekanisme komunikatif yang dibahas benar-benar mencerminkan pengalaman para informan.

Negosiasi Relasi Kuasa Antaretnis dan Ketimpangan Peluang Ekonomi

Relasi kuasa antaretnis merupakan dimensi penting untuk menjelaskan mengapa suatu kelompok atau individu dapat memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat, kuasa tidak selalu hadir melalui jabatan formal atau keputusan tertulis. Pengaruh juga dapat terbentuk melalui jaringan sosial, kedudukan tokoh masyarakat, hubungan ekonomi, kepemilikan sumber daya, dan kemampuan memengaruhi pandangan kolektif. Dalam konteks Rasau, hubungan antara masyarakat Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa perlu dianalisis dengan memperhatikan bagaimana berbagai sumber pengaruh tersebut bekerja dalam kehidupan sosial dan perdagangan. Penelitian tidak cukup hanya

mengidentifikasi kelompok yang dianggap lebih kuat, tetapi harus menjelaskan aktor yang memiliki pengaruh, dasar pengaruh yang digunakan, serta situasi ketika pengaruh tersebut berhubungan dengan pembatasan atau pemberian kesempatan ekonomi. Pendekatan ini penting untuk menghindari penyederhanaan bahwa kuasa melekat secara otomatis pada identitas etnis tertentu. Setiap kelompok memiliki keragaman posisi dan kepentingan, sehingga relasi kuasa perlu dipahami sebagai hubungan yang terbentuk melalui tindakan, interaksi, dan struktur sosial tertentu.

Pengaruh sosial dapat menjadi signifikan ketika seseorang atau kelompok memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan, membentuk norma, atau memengaruhi penerimaan terhadap aktivitas ekonomi pihak lain. Dalam hubungan perdagangan, misalnya, jaringan sosial dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi, membangun kepercayaan, dan mempertahankan hubungan dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap jaringan dapat menempatkan pelaku usaha pada posisi yang kurang menguntungkan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan ekonomi tidak selalu ditentukan oleh kemampuan individual, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam struktur hubungan sosial. Konsep kuasa simbolik Bourdieu (1991) relevan untuk menjelaskan bagaimana penilaian dan klasifikasi tertentu memperoleh pengakuan sehingga tampak wajar atau memiliki legitimasi. Ketika suatu pandangan mengenai siapa yang dianggap pantas menggunakan ruang ekonomi diterima secara luas, pandangan tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial meskipun tidak selalu disertai aturan formal. Namun, untuk menyatakan bahwa mekanisme tersebut benar-benar berlangsung di Rasau, penelitian harus menunjukkan bukti tentang siapa yang menyampaikan pandangan, bagaimana pandangan itu memperoleh pengakuan, dan apa konsekuensinya terhadap akses perdagangan. Dengan demikian, analisis kuasa tidak berhenti pada identifikasi dominasi, tetapi juga menelusuri proses yang membuat pengaruh tertentu dapat diterima dan dijalankan.

Relasi kuasa dalam konteks perdagangan juga perlu dibedakan antara kewenangan institusional dan pengaruh informal. Pemerintah desa, kecamatan, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha memiliki posisi serta batas kewenangan yang berbeda. Aparat pemerintahan menjalankan fungsi berdasarkan ketentuan dan tanggung jawab kelembagaan, sedangkan tokoh masyarakat dapat memiliki pengaruh yang bersumber dari kepercayaan, pengalaman, atau kedudukannya dalam komunitas. Kedua bentuk pengaruh tersebut dapat berinteraksi dalam penyelesaian persoalan sosial, tetapi tidak dapat dianggap memiliki dasar legitimasi yang sama. Karena itu, apabila terdapat dugaan pembatasan aktivitas perdagangan, penelitian perlu menelusuri apakah pembatasan tersebut berasal dari kebijakan formal, keputusan komunitas, tekanan sosial, atau tindakan individual. Pembedaan ini sangat penting untuk menjaga ketepatan analisis dan menghindari atribusi tanggung jawab yang tidak didukung bukti. Lamont dan Molnár (2002) menjelaskan bahwa batas sosial dapat menghasilkan konsekuensi nyata ketika klasifikasi antarkelompok berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kesempatan. Dalam kerangka tersebut, relasi kuasa dapat dianalisis melalui kemampuan aktor untuk membentuk batas, mempertahankan pengakuan, dan memengaruhi distribusi peluang. Dengan demikian, perhatian penelitian diarahkan pada mekanisme yang menghubungkan kewenangan, pengaruh sosial, dan akses ekonomi.

Meskipun relasi kuasa dapat menghasilkan ketimpangan, hubungan antarkelompok tidak selalu berlangsung secara satu arah atau tanpa kemungkinan perubahan. Individu dan kelompok tetap mempunyai kapasitas untuk merespons kondisi yang dihadapi melalui pembentukan jaringan, penyampaian keberatan, negosiasi dengan

tokoh masyarakat, maupun penggunaan saluran kelembagaan. Kapasitas tersebut merupakan bagian dari agensi yang perlu diperhatikan agar analisis tidak hanya menggambarkan pihak yang memiliki pengaruh dan pihak yang mengalami keterbatasan. Dalam perspektif Komunikasi Antarbudaya Kritis, persoalan kuasa juga berhubungan dengan kesetaraan posisi komunikatif, yakni sejauh mana setiap pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan memengaruhi pembahasan mengenai kepentingannya. Apabila satu pihak memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan persoalan dan penyelesaiannya, sedangkan pihak lain memiliki ruang yang terbatas untuk menyampaikan keberatan, maka ketimpangan tidak hanya berlangsung dalam akses ekonomi, tetapi juga dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, penelitian perlu menghubungkan pengalaman para informan dengan struktur jaringan sosial dan kewenangan yang mereka hadapi. Analisis tersebut dapat menjelaskan bagaimana kuasa diproduksi, dinegosiasikan, dan mungkin ditantang dalam hubungan masyarakat Jawa transmigran dan Tionghoa di Rasau, tanpa menggeneralisasi salah satu kelompok sebagai pihak yang selalu dominan ataupun selalu berada dalam posisi yang dirugikan.

Integrasi Teoretis: Negotiating Unequal Economic Belonging through Interethnic Communication

Keempat kategori yang telah dibahas menunjukkan bahwa identitas etnis, akses perdagangan, praktik komunikasi, dan relasi kuasa merupakan dimensi yang saling berhubungan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Rasau. Negosiasi identitas menjelaskan bagaimana individu dan kelompok membangun keterikatan serta memperoleh pengakuan dalam lingkungan sosial. Produksi eksklusi ekonomi memperlihatkan kemungkinan hubungan antara batas sosial dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan. Sementara itu, komunikasi antaretnis menjelaskan bagaimana identitas dan perbedaan memperoleh makna melalui narasi, interaksi, serta praktik representasi. Relasi kuasa kemudian memberikan penjelasan mengenai mengapa kemampuan untuk menentukan batas, menyampaikan kepentingan, dan memperoleh akses tidak selalu terdistribusi secara setara. Keempat kategori tersebut tidak berdiri sebagai persoalan yang terpisah, melainkan membentuk rangkaian proses yang dapat saling memengaruhi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap eksklusi ekonomi memerlukan pendekatan yang mampu menghubungkan pengalaman individual dengan praktik komunitas dan struktur sosial yang lebih luas.

Integrasi konseptual penelitian ini diarahkan pada kategori inti *Negotiating Unequal Economic Belonging through Interethnic Communication*. Konsep tersebut menggambarkan proses ketika keanggotaan dalam kehidupan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pengakuan sosial, legitimasi identitas, dan posisi komunikatif dalam hubungan antarkelompok. Dalam proses tersebut, identitas menjadi salah satu dasar pembentukan batas sosial, sedangkan komunikasi menjadi ruang tempat batas tersebut dibangun, dipertahankan, atau dipertanyakan. Ketika batas sosial berhubungan dengan distribusi kesempatan perdagangan, persoalan identitas memperoleh konsekuensi ekonomi yang lebih konkret. Pada saat yang sama, relasi kuasa memengaruhi kemampuan para aktor untuk mendefinisikan situasi, mempertahankan kepentingan, dan memperoleh pengakuan. Konsep inti ini dengan demikian berupaya menjelaskan hubungan antara dimensi simbolik dan material dalam kehidupan masyarakat multietnis. Fokus analisis bukan semata-mata pada keberadaan perbedaan etnis, melainkan pada proses sosial yang membuat perbedaan tersebut memiliki pengaruh terhadap keanggotaan dan kesempatan ekonomi.

Dalam perspektif Komunikasi Antarbudaya Kritis, integrasi tersebut memberikan penekanan pada keterkaitan antara komunikasi dan struktur kekuasaan. Interaksi antarindividu tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral karena setiap pihak dapat membawa pengalaman, kepentingan, dan posisi sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap identitas dan aktivitas perdagangan perlu diperiksa bersama dengan kondisi yang memungkinkan suatu pandangan memperoleh legitimasi. Analisis dapat dilakukan melalui tiga tingkat yang saling berhubungan. Pada tingkat mikro, perhatian diarahkan pada pengalaman, interaksi, ujaran, dan strategi komunikasi individu. Pada tingkat meso, analisis mencakup norma komunitas, jaringan sosial, hubungan perdagangan, dan pengaruh tokoh masyarakat. Pada tingkat makro, penelitian mempertimbangkan sejarah transmigrasi, struktur kesempatan ekonomi, serta kerangka kelembagaan yang membentuk hubungan sosial di Rasau. Hubungan ketiga tingkat tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan bagaimana pengalaman individual terhubung dengan praktik komunitas dan kondisi struktural. Dengan demikian, kontribusi CIC dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya membaca komunikasi sebagai bagian dari proses pembentukan dan negosiasi ketidaksetaraan, bukan hanya sebagai sarana untuk mengurangi perbedaan budaya.

Secara konseptual, *Negotiating Unequal Economic Belonging through Interethnic Communication* menawarkan cara untuk memahami eksklusi ekonomi sebagai proses relasional yang melibatkan pengakuan, komunikasi, dan distribusi kekuasaan. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh hubungan masyarakat Jawa transmigran dan Tionghoa di Rasau berlangsung dalam pola konflik atau bahwa setiap perbedaan identitas selalu menghasilkan pembatasan ekonomi. Sebaliknya, konsep tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi kondisi ketika perbedaan etnis menjadi relevan dalam pembentukan batas sosial dan memengaruhi kesempatan ekonomi. Pengalaman kerja sama, hubungan saling bergantung, penolakan terhadap stereotip, serta perbedaan pandangan di dalam masing-masing kelompok juga perlu diperhitungkan dalam proses analisis. Dalam pendekatan CGT, kategori inti harus memiliki kemampuan menjelaskan variasi pengalaman dan hubungan antarkategori, bukan sekadar menjadi istilah yang merangkum tema penelitian. Oleh karena itu, kekuatan konseptual kategori inti ini bergantung pada konsistensinya dengan data, kemampuannya menjelaskan proses sosial, dan keterbukaannya terhadap kasus yang tidak sesuai dengan pola dominan. Dengan landasan tersebut, penelitian dapat memberikan kontribusi kontekstual terhadap kajian komunikasi antarbudaya, khususnya mengenai hubungan antara identitas, legitimasi sosial, akses ekonomi, dan kuasa dalam masyarakat multietnis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sosial-ekonomi masyarakat Jawa transmigran dan komunitas Tionghoa di Rasau perlu dipahami melalui keterkaitan antara identitas etnis, keanggotaan lokal, akses perdagangan, praktik komunikasi, dan relasi kuasa. Identitas etnis tidak hanya berkaitan dengan asal-usul kelompok, tetapi juga dibentuk melalui pengalaman bermukim, interaksi sosial, serta pengakuan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, eksklusi ekonomi dapat dipahami sebagai persoalan relasional ketika perbedaan identitas berhubungan dengan legitimasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan. Komunikasi antaretnis memiliki peran penting karena melalui narasi, representasi, dan interaksi sosial, batas antarkelompok dapat dibentuk, dipertahankan, maupun dipersoalkan. Sementara itu, relasi kuasa memengaruhi kemampuan para aktor dalam menyampaikan kepentingan, memperoleh pengakuan, dan memengaruhi distribusi kesempatan ekonomi. Keempat dimensi tersebut terintegrasi dalam konsep *Negotiating Unequal Economic*

Belonging through Interethnic Communication, yang menempatkan keanggotaan ekonomi sebagai proses sosial-komunikatif yang berlangsung dalam hubungan antaretnis dan struktur kekuasaan lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian Komunikasi Antarbudaya Kritis dengan menempatkan eksklusi ekonomi sebagai fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan persaingan pasar atau perbedaan budaya, tetapi juga dengan proses pembentukan identitas, legitimasi sosial, komunikasi, dan ketimpangan akses. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antaretnis melalui keterkaitan antara interaksi individu, norma komunitas, jaringan sosial, dan struktur kelembagaan. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun tata kelola aktivitas ekonomi yang transparan, menyediakan ruang komunikasi yang setara, serta memastikan bahwa perbedaan identitas tidak menjadi dasar pembatasan kesempatan perdagangan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada konteks sosial tertentu di Rasau sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh masyarakat Jawa dan Tionghoa di wilayah lain. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif pada kawasan multietnis dan wilayah transmigrasi lainnya dengan memperhatikan variasi sejarah lokal, mekanisme ekonomi, serta hubungan kelembagaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai negosiasi identitas dan keadilan ekonomi dalam masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

Birnie-Smith, J. (2022). Investigating structure and agency in Chinese Indonesians' identity work. Journal of Linguistic Anthropology, 32(3), 561–584. https://doi.org/10.1111/jola.12375

Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power (J. B. Thompson, Ed.; G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Harvard University Press.

Bucholtz, M., & Hall, K. (2005). Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach. Discourse Studies, 7(4–5), 585–614. https://doi.org/10.1177/1461445605054407

Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2nd ed.). SAGE Publications.

Fachrurrazi, F. (2019). Preservation of status quo or inter-ethnicity relation: The dynamics of Malay-Chinese economic relation in the Northern Coast Area of West Kalimantan. I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics, 5(1), 17–36. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/3690

Halualani, R. T. (2011). In/visible dimensions: Framing the intercultural communication course through a critical intercultural communication framework. Intercultural Education, 22(1), 43–54. https://doi.org/10.1080/14675986.2011.549644

Halualani, R. T., & Nakayama, T. K. (2010). Critical intercultural communication studies: At a crossroads. In T. K. Nakayama & R. T. Halualani (Eds.), The handbook of critical intercultural communication (pp. 1–16). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444390681.ch1

Harjanti, D. T. (2021). Sejarah penempatan dan adaptasi lingkungan baru transmigran Jawa Barat di Kecamatan Rasau Jaya. Swadesi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 2(1), 74–85. https://doi.org/10.26418/swadesi.v2i1.46423

Heidhues, M. S. (2003). Golddiggers, farmers, and traders in the "Chinese districts" of West Kalimantan, Indonesia. Cornell Southeast Asia Program Publications.

Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. Annual Review of Sociology, 28, 167–195. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107

Piller, I. (2011). Intercultural communication: A critical introduction. Edinburgh University Press.

Sanders, J. M. (2002). Ethnic boundaries and identity in plural societies. Annual Review of Sociology, 28, 327–357. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.140741

Sen, A. (2000). Social exclusion: Concept, application, and scrutiny (Social Development Papers No. 1). Asian Development Bank. http://hdl.handle.net/11540/2339

Ting-Toomey, S. (2017). Identity negotiation theory and mindfulness practice. In M. Powers (Ed.), Oxford research encyclopedia of communication. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.489